

**STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DI
TENGAH PANDEMI COVID 19 DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DI
TENGAH PANDEMI COVID 19 DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh :

AHMAD MUQTASIR MUQSIT

Nomor Induk Mahasiswa: 10564 11169 16

Kepada

10/09/2021

*L. exp
cab. Alumni*

*R/0115/1PM/21 CD
MUG
S'*

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) di tengah pandemic covid 19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba 2020

Nama mahasiswa : Ahmad Muqtasir Muqsit

Nomor Stambuk : 105 641 116 916

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si


Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si

PENERIMA TIM

Telah di terima dan di setuju oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammdiyah Makassar, Nomor : 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari senin, 16 Agustus 2021.

Ketua



Dr.Hj.Ihyani Malik,S.Sos,M.Si

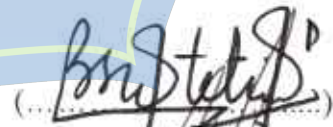
Sekretaris



Dr.Burhanuddin,S.Sos,M.Si

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
2. Ahmad Harakan,S.IP., M.HI
3. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP
4. Hardianto Hawing, ST., MA




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Muqtasir Muqsit

Nomor Stambuk : 105 641 116 916

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 29 Juni 2021

Yang menyatakan,

Ahmad Muqtasir Muqsit

ABSTRAK

Ahmad Muqtasir Muqsit 2021. Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Ahmad Taufik)

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif yaitu menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah yang diteliti yaitu Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari Masyarakat, KPUD, dan pengurus DPD PAN Kabupaten Bulukumba selaku informan utama, dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dengan sosialisasi kandidat dimana pelaksanaan pilkada yang dilakukan dengan standar protokol kesehatan Covid-19 membuat kegiatan sosialisasi dilakukan secara terbatas, sehingga partai PAN Bulukumba lebih banyak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasinya. Dukungan partai politik dimana partai PAN bersama Gerindra, PKS dan Berkarya yang mengusung pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf memiliki jumlah suara dalam DPR sebanyak 13 kursi. Kampanye partai PAN dalam melakukan kampanye di tengah pandemi Covid-19 membentuk struktur tim pemenangan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten dengan memaksimalkan wilayah-wilayah yang bukan merupakan basis kandidat. pemungutan dan perhitungan suara kandidat dan tim pemenangan memperkuat pengawalan basis massa dan pembentukan saksi-saksi setiap TPS. sengketa pilkada strategi yang dilakukan oleh PAN dalam menghadapi sengketa pilkada dengan pelaporan oleh pemohon yaitu pasangan nomor urut dua dengan mempersiapkan bukti-bukti, saksi dan kuasa hukum. Faktor pendukung, yaitu struktur tim pemenangan yang solid dan ketokohan dari kandidat yang diusung PAN. Faktor Penghambat, yaitu apatisme masyarakat dan letak geografis Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci : Strategi, Pilkada, Pandemi Covid 19.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku pembimbing I dan Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pengurus DPD PAN, KPUD dan Masyarakat yang berada di ruang lingkup Kabupaten Bulukumba yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
8. Saudara(i) Sospol angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya

milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 29 Juni 2021

Yang menyatakan,

Ahmad Muqtasir Muqsit



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terahulu	6
B. Konsep Strategi	7
C. Konsep Partai Politik	11
D. Konsep Pemilihan Umum	13
E. Pemilihan Kepala Daerah	16
F. Kerangka Pikir	18
G. Fokus Penelitian	19
H. Deskripsi Fokus Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian	22
C. Sumber Data	23
D. Informan Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
G. Keabsahan Data	26

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Obyek Penelitian	28
B. Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.....	38
a. Sosialisasi Kandidat	40
b. Dukungan Partai Politik	44
c. Kampanye	48
d. Pemunutan dan Perhitungan Suara	52
e. Sengketa Pilkada	55
C. Faktor yang Melatarbelakangi Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.....	59
a. Faktor Pendukung	59
b. Faktor Penghambat	62
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan wadah menghasilkan wakil rakyat yang bersedia dan mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam ajaran demokrasi dan sesuai dengan amanah konstitusi. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi. (Ubaedillah & Abdal, 2014).

Dalam pemilihan kepala daerah tidak terlepas peran penting partai politik sebagai infrastruktur politik berkontribusi nilai demokrasi yang lebih baik. Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (Budiarjo, 2008). Parpol bersaing memperoleh kedudukan politik, adalah melalui Pemilihan Umum (PEMILU) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan untuk memenangkan pemilu, parpol harus memperoleh dukungan dari masyarakat. Tentu tugas berat bagi sebuah parpol bagaimana partai tersebut bisa diterima

dan didukung oleh masyarakat sebagai konstituennya agar kader-kadernya dapat menjadi pemegang otoritas di lingkungan pemerintahan guna mewujudkan visi dan misi partai politik tersebut. Permasalahan ini sangat krusial, karena hal ini menjadi langkah awal bagaimana partai harus menanamkan citranya sebagai organisasi politik dalam benak masyarakat.

Menanamkan citra bukanlah tugas sederhana dan mudah, mempublikasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai partai membutuhkan penanganan yang khusus mengingat bahwa parpol memiliki dinamika yang tidak mudah diduga. Oleh sebab itulah, keberadaan strategi untuk menjangkau konstituen atau pemilih dalam dunia kepartaian menjadi sesuatu yang sangat strategis dan teramat penting.

Strategi merupakan suatu rencana yang sifatnya serba komprehensif, bagaimana sesuatu organisasi dapat mencapai misi dan objeknya serta mengusahakan sekecil mungkin hambatan (Ernaya, 2013). Strategi memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan dan tercapainya suatu visi, misi, dan tujuan organisasi, termasuk organisasi partai politik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka partai politik membutuhkan suatu strategi tertentu untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam setiap pemilihan langsung (pemilihan presiden, anggota legislatif, kepala daerah). Strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali

tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Partai Amanat Nasional juga merupakan salah satu partai politik yang mengikuti Pemilu 2014. Dalam pemilu 2014, strategi politik yang dilakukan oleh PAN adalah dengan membangun kekuatan politik lokal di tingkat daerah, dengan mengkader tokoh daerah yang tentu memiliki cukup banyak masa, selain itu PAN juga melakukan strategi segmentasi pemilih dengan dasar segmentasi Demografi yang dibedakan berdasarkan umur, yang terfokus pada pemilih pemula dengan mengakomodasi kepentingan pemilih pemula tersebut, PAN berharap agar mereka dapat diingat oleh pemilih pemula sebagai partai politik yang mengakomodasi kepentingan pemuda. Strategi pengkaderan tokoh daerah memang diakui secara terbuka oleh PAN menjadi salah satu strategi PAN untuk meningkatkan elektabilitas dan suara mereka pada Pemilu 2014.

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2015 menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan strategi pemenangan bagi Partai Amanat Nasional dalam situasi masa pandemi covid 19 bisa jadi pelaksanaan strategi untuk memenangkan pasangan yang diusung dalam pemilu pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2020 mendatang berbeda dibandingkan kontestasi sebelumnya, pasangan yang diusung pada pemilu pada Bulukumba tahun 2015 lalu, Ir. H. Masykur A. Sulthan, MS dan Drs. H. Andi Edy Manaf

hanya mampu berada pada urutan ke empat (4) dari lima (5) . (KPU Kabupaten Bulukumba,2015).

Strategi politik penting sekali dilakukan oleh partai pengusung setelah Partai PAN menentukan pilihan ke HA. Muchtar Ali Yusuf yang biasa disapa Andi Utta berpasangan dengan Andi Edi Manaf ini dibuktikan setelah partai PAN mengeluarkan Model Surat BI KWK PAN (Rakyat Sulsel,3/8/2020). Hal ini mengingatk bahwa diperlukan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan organisasi yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk meneliti bagaimana strategi pemenangan yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Bulukumba dalam meraih dukungan untuk memenangkan Pemilu pada 2020 di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan uraian di atas maka diambil judul penelitian yaitu **"Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk Mengertahui Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian:

1. Dapat memahami dan mempelajari secara mendalam tentang Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. Maka hal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, serta bagi penulis lainnya untuk meneliti dengan judul yang sama.
2. Dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara khusus merupakan sumbangan pemikiran bagi partai PAN dalam perubahan-perubahan strategi kedepan dalam setiap kontestasi pemilihan umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

(Perdana 2014) *Political Marketing* Partai 8 Politik Baru Menuju Pemilu Tahun 2014, Studi Kasus: Strategi pemenangan Partai Nasdem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi partai politik Nasdem dalam menyampaikan pesan politik mereka menggunakan strategi *pull political marketing*. Hal ini dilakukan karena melihat fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitas serta kemenangan partai dalam Pemilu.

Pratiwi (2014) berjudul Strategi Kampanye Partai Golkar dan PDI Perjuangan Pasca Penetapan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 pada pemilu legislatif di Kota Tanjung Pinang. Hasil penelitian menunjukkan strategi kampanye Partai Golkar Pasca Penetapan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan PDIP. Hanya sedikit berbeda pada penyampaian pesan kampanyenya yang mana Partai Golkar lebih mengfokuskan pada penyampaian pesan kampanye secara *door to door* dan dialog terbuka sedangkan PDI Perjuangan lebih fokus pada penyampaian pesan kampanye melalui pawai dan diskusi.

Frengki (2016) yang berjudul Strategi pemenangan partai Golkar dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif yang berusaha

melihat bagaimana strategi komunikasi 9 politik Partai Golkar di Kabupaten Sikka dalam pemilu legislatif tahun 2014. Hasil penelitian ini dikatakan bahwa kemenangan calon legislatif dalam pemilu legislatif yang diperlihatkan dari 5 calon legislatif Partai Golkar Kabupaten Sikka muncul dari kekuatan sosial, seni, budaya dan keagamaan yang sebelumnya mereka miliki, selain itu popularitas, citra dan akseptabilitas dari setiap calon telah terbentuk terlebih dahulu. Strategi dan desain pesan komunikasi politik yang dilakukan cenderung mempertegas representasi dan presentasi diri yang telah dipersepsikan masyarakat kepadanya serta kekuatan finansial diperlukan untuk pembiayaan dan ongkos politik yang harus dikeluarkan.

B. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan. Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar dalam (Rachmattie, 2013) strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (action plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengendalian, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Tjiptono istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Lindawati, 2014).

Sedangkan Menurut Pearce II dalam (Gunawan, 2015), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan Perusahaan dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan. Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya (Wedhasmara, 2014).

Strategi memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan dan tercapainya suatu visi dan misi organisasi. Sebagaimana dikemukakan Salusu strategi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasarnya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Defenisi itu sejalan dengan yang mengemukakan bahwa strategi adalah suatu rencana yang sifatnya serba komprehensif, bagaimana sesuatu organisasi dapat mencapai misi dan objeknya serta mengusahakan sekecil mungkin hambatan (Napitupulu, 2013).

2. Tingkatan Strategi

Ahli strategi Dan Schendel, dalam (Amalia & Samopa, 2012) membagi strategi menjadi 4 (empat) tingkat yaitu: *Enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy* yang dibedakan berdasarkan substansinya.

- a. *Enterprise strategy*, adalah strategi yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga strategi ini memperlihatkan realisasi antara organisasi dengan masyarakat luar sejauh realisasi tersebut akan menguntungkan organisasi. Sehingga masyarakat percaya bahwa organisasi sungguh-sungguh berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan telah dipertimbangkan secara etis.
- b. *Corporate strategy*, yakni strategi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi dan meliputi seluruh bidang yang digeluti oleh organisasi

tersebut. Pengertian tersebut di atas mengandung makna bahwa strategi ini akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi urusan kita dan bagaimana mengendalikan urusan itu. Oleh sebab itu penggunaan strategi ini hendaknya dapat dikuasai oleh para pimpinan organisasi

- c. *Business strategy*, merupakan penjabaran langkah-langkah bagaimana merebut suara masyarakat. Pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa strategi ini memusatkan perhatian pada keunggulan kompetitif atau kalangan organisasi non profit lebih dikenal dengan keuntungan komparatif.
- d. *Functional strategy*, yaitu strategi pendukung untuk menunjang suksesnya strategi lainnya yang mencakup aspek ekonomi, aspek manajemen, dan isu strategi yang fungsi utamanya mengontrol situasi lingkungan yang selalu berubah. Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi terdiri dari enterprise strategy yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, *corporate strategy* yang berkaitan dengan misi organisasi, *business strategy* yang berkaitan dengan cara merebut pasar dan *functional strategy* yang merupakan strategi pendukung berdasarkan perubahan situasi lingkungan.

Strategi politik merupakan metode dan konsep aplikasi marketing dalam konteks politik, marketing dilihat sebagai perangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai,

karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat atau kontestan. Adapun strategi yang harus ditempuh partai dalam memenangkan kandidat dalam pemilihan umum yaitu (Firmanzah 2012):

1. Marketing Politik
2. Komunikasi Politik

C. Konsep Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan menurut Sigmund Neuman dalam (Hidayat, 2014) partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Lebih lanjut menurut Rusadi: "partai politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (*power endeavor*)". Kemudian menurut Strom dalam (Hidayat, 2014) partai politik adalah kelompok atau organisasi yang digunakan untuk menempatkan kandidat

dalam jabatan politik tertentu. Lebih jauh lagi partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang beroperasi dalam sistem politik”.

Partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili (Natalia, 2015)

Partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kadindat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas. Friedrich dalam (Surbakti, 2011) memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.

Sementara itu, Budiardjo dalam (Kadir, 2014) memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintah dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Partai politik merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, fikiran-fikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Keberadaan setiap partai politik ditentukan oleh 2

faktor: *pertama*, status hukum partai politik sebagai badan hukum (*rechts persoon*), sehingga dapat menjadi subjek yang diakui sah untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Sedangkan yang *kedua*, status partai politik itu dalam dalam kegiatan pemilu, yaitu apakah partai politik itu berhak menjadi peserta atau tidak ditentukan oleh sejauh mana partai politik yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

D. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut (Hanafi, 2011) pengertian Pemilu pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum (Dedi, 2019). Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut (Mulyono & Fatoni, 2019) :

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin

kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

E. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko dalam pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni (Solihah, 2018):

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut

serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Fungsi Pemilihan Umum Menurut Kansil dan Christine dalam (Sulaeman, 2017) fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

E. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini terdiri dari 240 pasal, dari 240 pasal tersebut, 63 pasal di antaranya

mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu pasal 56 sampai dengan pasal 119 (Wijayanti, 2017).

Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD 1945, undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Sistem pilkada dapat dibedakan dalam 2 jenis, (Suyatno, 2016) yaitu pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metoda tersebut adalah bagaimana partisipasi politik rakyat dilaksanakan atau diwujudkan. Tepatnya adalah metoda penggunaan suara yang berbeda.

Pilkada yang tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, dapat disebut dengan pilkada tak langsung, seperti sistem pengangkatan dan/atau penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem pemilihan perwakilan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam sistem pengangkatan dan/atau penunjukan oleh pemerintah pusat, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan bulat-bulat kepada pejabat pusat, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri. Dalam sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kedaulatan rakyat atau suara rakyat diwakilkan kepada

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebaliknya pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi implementasi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena itulah, pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi partisipatoris, sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis (Kumolo, 2015).

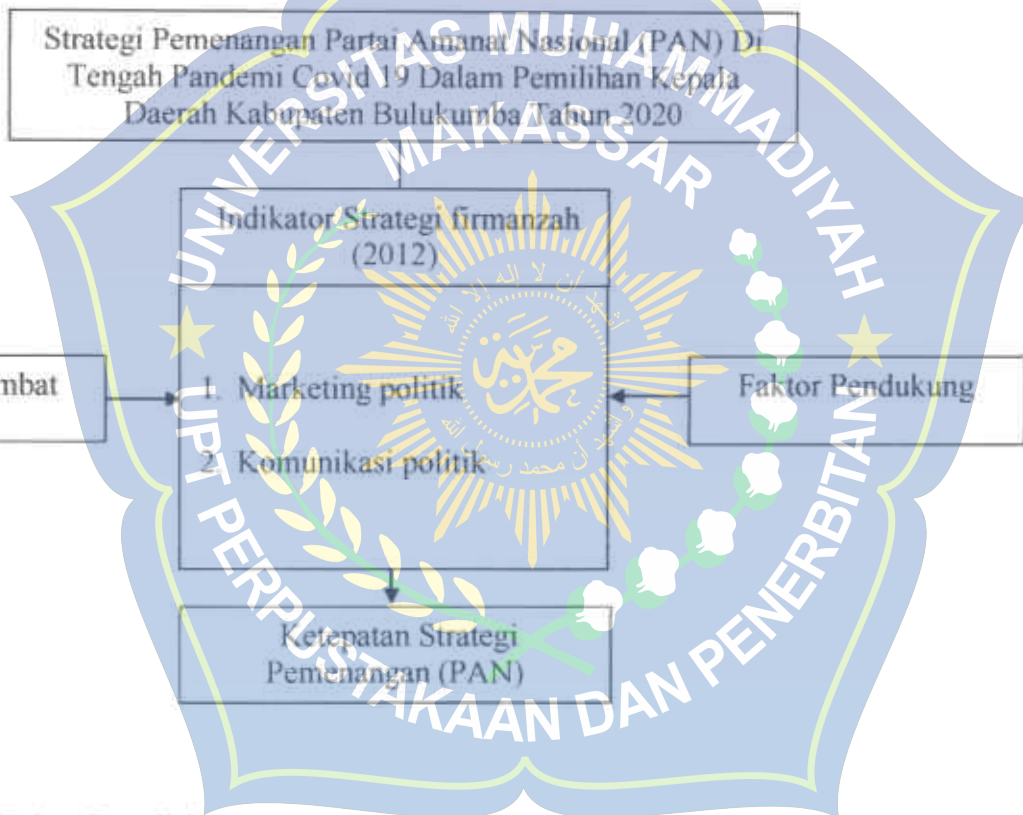
Cara paling efektif untuk membedakan pilkada langsung dan tak langsung adalah dengan melihat tahapan-tahapan kegiatan yang digunakan. Dalam pilkada tak langsung, partisipasi rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elit. Rakyat sekadar menjadi objek politik, misalnya kasus dukung mendukung. Penonjolan peran dan partisipasi terletak pada elit politik, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pejabat pusat. Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan (Nugraha & Mulyandari, 2016).

F. Kerangka Pikir

Strategi kemenangan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) diharapkan seluruh kader untuk mendulang suara yang signifikan dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba tanggal 09 Desember 2020, hingga akhirnya orang-orang yang di usung dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas terkait pelaksanaan tugas maka penulis mengurai dan mendiskripsikan sesuai dengan konsep strategi yang dikemukakan oleh (Firmanzah,2008) melalui skema kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah di bangun maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dengan rujukan idikator Marketing politik dan komunikasi politik serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi yang dijalankan oleh partai PAN.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun gambaran penelitian yang akan dilakukan berdasarkan fokus yang telah di bangun adalah sebagai berikut:

1. *Political marketing* adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh kandidat atau kontestan politik dalam membangun kepercayaan dan *image* publik yang berkaitan dengan program-program yang diusung dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba.
3. Faktor pendukung adalah proses memperhitungkan kekuatan dan peluang dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba.
4. Faktor penghambat adalah merupakan bentuk kelemahan dan ancaman bagi partai yang menjadi penghambat proses dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba. Rencana waktu dalam penelitian dilakukan selama 2 bulan pasca terbit surat izin penelitian dan seminar pra proposal. Adapun alasan penelitian untuk melihat bentuk strategi politik partai Amanat Nasional dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah survey yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah Informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif tipe penelitian ini menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah yang diteliti yaitu Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian, yang berupa hasil wawancara kepada para informan atau pengamatan langsung penulis
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis dan tidak tertulis

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* penulis memilih secara sengaja yang di anggap tahu pasti dengan masalah yang diteliti yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Andi Saifullah	AS	Sekretaris DPD PAN Bulukumba
2.	Muliyadi	MY	Pengurus DPD PAN Bulukumba
3.	Kaharuddin, S.Pd,MM	KH	Ketua KPUD Bulukumba
4.	Reskiana Mastur	KM	Kasubag Program dan Data
5.	Irwan	IW	Masyarakat
6.	Andi Zul	AZ	Masyarakat
7.	H. Mustakim	MT	Masyarakat
8.	Kurdin Wahab	KW	Masyarakat
	Jumlah Total	8	Informan

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan caramelakukan pengamatan langsung Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meeliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut (Sugiono, 2014) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada BAB ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian tentang Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. Sebelum peneliti masuk pada hasil penelitian penulis terlebih dahulu memaparkan gambaran dari lokasi objek penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 153 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara $05^{\circ} 20' - 05^{\circ} 40'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 58' - 120^{\circ} 28'$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi -

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 Km² atau sekitar 1,85 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 126 desa/kelurahan yang terdiri dari 24 kelurahan dan 102 desa. Ditinjau dari 10 Kecamatan terdapat 2 kecamatan yang luas,

yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Bulukumpa, masing-masing 173,51 Km² dan 171,33 Km², sekitar 29,87 % dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota Bulukumba) dengan luas wilayah 14,44 Km² atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober –Maret dan musim rendengan antara April-September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo-bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini *butta panrita lopi* sudah terdiri atas 10 kecamatan. Ke-10 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan Kindang
4. Kecamatan Rilau Ale
5. Kecamatan Bulukumpa
6. Kecamatan Ujungloe
7. Kecamatan Bontobahari
8. Kecamatan Bontotiro
9. Kecamatan Kajang
10. Kecamatan Herlang

Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 tercatat 400.990 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 187.439 jiwa dan perempuan sebanyak 211.092 jiwa, dengan rasio jenis kelamin (perbandingan laki-laki dan perempuan) adalah 89, tersebar di 10 Kecamatan. Dengan konsentrasi penduduk di (4) empat kecamatan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Kajang dan

Kecamatan Bulukumpa sedangkan Kecamatan yang kurang penduduknya adalah terdapat enam Kecamatan yaitu Kecamatan Bontobahari, Herlang Ujungloe, Rilau Ale, Kindang, dan Bontotiro, untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumpa Tahun 2013

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Gantarang	34.921	37.970	72.891	91
2.	Ujungbulu	23.789	25.505	49.291	92
3.	Ujung Loe	19.140	21.356	40.496	89
4.	Bonto Bahari	11.052	13.509	24.561	81
5.	Bonto Tiro	10.252	13.113	23.365	78
6.	Herlang	11.179	13.538	24.717	82
7.	Kajang	22.934	25.293	48.227	90
8.	Bulukumpa	24.939	27.134	52.073	91
9.	Rilau Ale	18.232	20.948	38.730	88
10.	Kindang	14.860	15.682	30.542	94
	Jumlah	191.298	213.598	404.896	89

(Sumber: BPS Bulukumba 2019)

2. Partai Amanat Nasional Bulukumba

Partai Amanat Nasional adalah partai politik Indonesia yang diketuai oleh Hatta Rajasa. Partai ini berdiri sejak 3 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya di Jakarta.

Partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Partai politik ini adalah salah satu partai yang menjadikan sebagai landasan asas berpolitiknya, yaitu "Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam". Menurut PAN Agama adalah landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.

Partai ini bersifat terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri. Visi PAN adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misinya adalah mewujudkan kader yang berkualitas; mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat; mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur; mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan

bangsa; mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional. Garis Perjuangan Partai : partai dan pemenang pemilu; perkaderan yang handal; partai yang dicintai rakyat; membangun organisasi PAN yang modern.

Pada periode 2015-2020, PAN memiliki struktur kepengurusan yaitu : Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan, Badan Komunikasi Politik, Badan Litbang, Badan Advokasi, Badan Perkaderan, Badan Luar Negeri, Badan Perempuan, Badan Kebijakan Publik, Bakokal, Badan Ekonomi dan Bappilu.

Dewan perwakilan daerah partai amanat nasional (PAN) Bulukumba merupakan salah satu partai besar di Kabupaten tersebut. Pada pileg tahun 2019 partai PAN berhasil mendapatkan perolehan sebanyak empat kursi. Selain tersebut PAN berhasil menjadi salah satu pemenang dalam pilkada Bulukumba Tahun 2020 dengan mengusung pasangan nomor urut 4 Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf bersama dengan Gerindra, PKS dan Berkarya.

DPD PAN Bulukumba untuk saat ini baru saja melakukan musyawarah daerah untuk priode 2020-2025 dimana ketua terpilih merupakan wakil bupati terpilih Kabupaten Bulukumba Andi Edy Manaf yang langsung ditunjuk oleh ketua DPP PAN Pusat.

3. KPUD Bulukumba

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

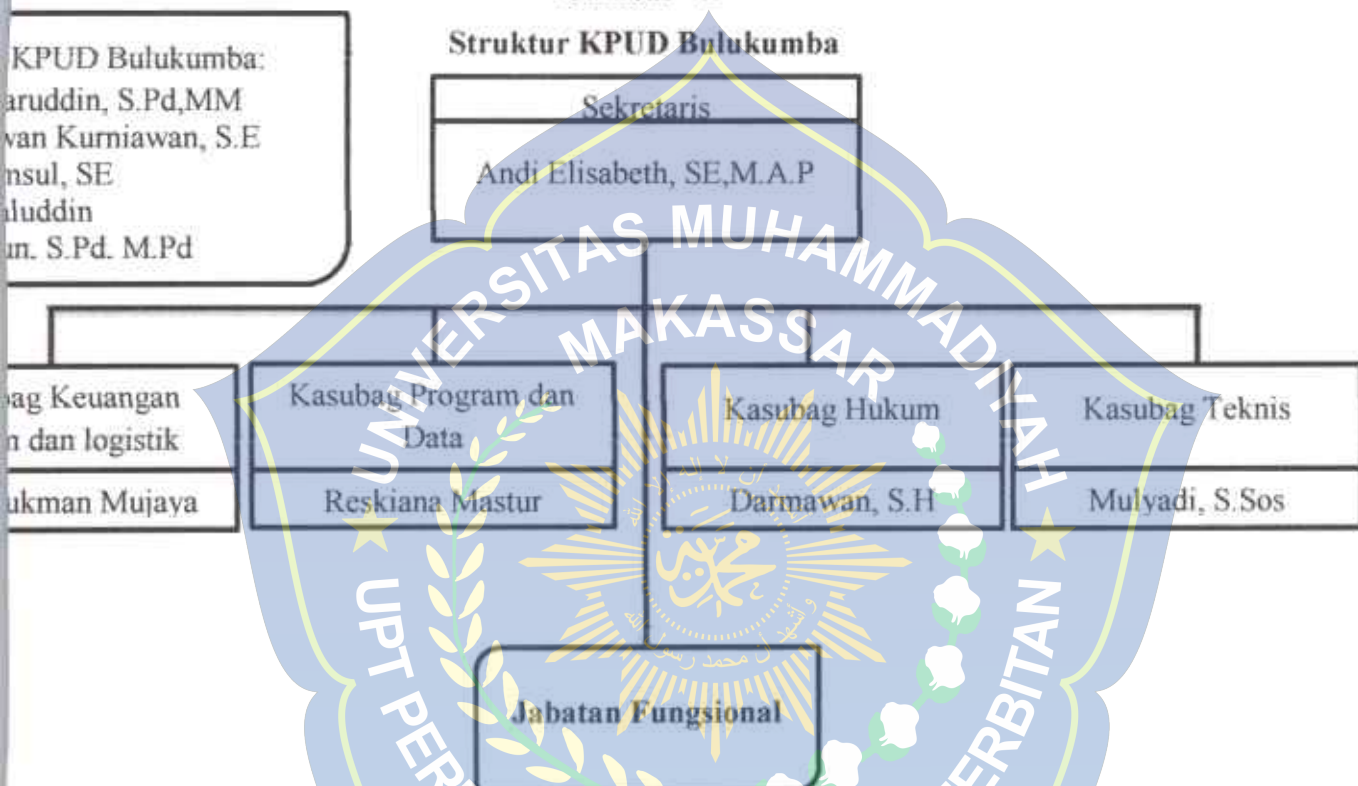
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum;

keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Gambar 4.1

Struktur KPUD Bulukumba



Adapun yang menjadi visi dan misi dari Kpud Bulukumba adalah sebagai berikut:

VISI:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI:

- 1) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.

- 2) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- 5) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Keratanegaraan.
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

Penyelenggaraan pilkada Bulukumba Tahun 2020 berhasil di menangkan oleh pasangan Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf dengan hasil rekapitulasi suara sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Rekapitulasi Pilkada Bulukumba Tahun 2020

nomor Urut Kandidat	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Andi Hamzah Pngki-Hj-A. Murniyati, M.SI	12.517
2	H. Askar HL, SE-Arum Spink, S.H.I	67.855
3	Tomy Satria Y, S.IP-H. A. Makkassau, MM	63.672
4	Muchtar Ali Yusuf-H. A. Edy Manaf, S.Sos	92.978
Jumlah Suara SAH		237,022
Jumlah Suara Tidak SAH		1.986
Jumlah Suara yang Masuk		239,008

Sumber: KPUD Bulukumba 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 Jumlah suara masuk sebanyak 239.008 pemilih dimana pasangan Muchtar Ali Yusuf-H. A. Edy Manaf, S.Sos memperoleh suara sebanyak 92.987 dan dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada Bulukumba Tahun 2020.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Berbeda dengan pilkada sebelumnya pada tahun 2020 pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdapat perubahan yang signifikan akibat dari adanya pandemic Covid-19. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain

mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Kabupaten Bulukumba yang juga terlibat dalam perhelatan Pilkada 2020 yang melibatkan empat pasangan kandidat yaitu nomor urut 1 ada Andi Hamzah Pangki-Andi Murniyati Makking. Nomor urut 2 ditempati Askar HL-Arum Spink. Lalu, nomor urut 3 terdapat pasangan Tomy Satria Yulianto-Andi Makkasau. Sementara pasangan nomor urut 4 ada Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf.

Pada pilkada Bulukumba tahun 2020 partai PAN mengusung pasangan Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf sebagai kandidat yang bertarung dalam kontestasi tersebut. Bersama partai Gerindra, partai PKS dan Partai Berkarya dengan total sebanyak 13 kursi. Tentu dalam pelaksanaan Pilkada 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya, sehingga beberapa strategi yang dilakukan oleh Partai PAN dalam memenangkan

kandidat yang diusung dapat dilihat melalui proses sosialisasi kandidat, dukungan partai politik, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara sampai kepada tahap sengketa pilkada yang dipaparkan melalui pembahasan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

a. Komunikasi Politik

Dalam komunikasi politik yang dimaksud komunikator, yaitu individu-individu yang berada dalam suatu instansi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara.

Sosialisasi politik merupakan sarana untuk memberitahukan pada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar. Sosialisasi politik sendiri bertujuan agar warga negara yang sudah mempunyai hak pilih mengetahui betapa politik itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari proses sosialisasi yang dilakukan baik oleh kandidat atau partai politik dalam meraih dukungan dari masyarakat. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh partai PAN Bulukumba dalam pelaksanaan pilkada bertujuan untuk memperkenalkan kandidat yang mereka usung dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat untuk memaparkan visi misi kandidat usungan Partai PAN.

“Proses sosialisasi merupakan langkah awal dalam memperkenalkan kandidat yang kami usung kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat benar-benar dapat memilih kandidat yang tepat dalam membangun Bulukumba kearah yang lebih baik. Partai PAN adalah

salah satu partai yang mendorong geliat usaha UMKM khususnya di Kabupaten Bulukumba ini, melalui proses sosialisasi tersebut kami memaparkan kepada masyarakat program-program unggulan kami dalam meningkatkan pembangunan Bulukumba. Tentu ada banyak program yang kami sampaikan kepada masyarakat yang paling utama bagaimana program tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu yang terpenting” (Wawancara dengan MY 12 April 2021).

Senada dengan pendapat tersebut sekretaris partai PAN Kabupaten Bulukumba juga memberikan tanggapan terkait bentuk sosialisasi dalam memenangkan kandidat.

“Dalam kondisi pandemi covid-19 tentu ada strategi sendiri yang kami lakukan dalam melakukan sosialisasi pengenalan kandidat, jika proses kampanye sebelumnya kita menghadirkan masyarakat dalam sebuah forum pada pilkada 2020 kami lebih banyak menggandeng tokoh masyarakat sebagai orang yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Dengan cara tersebut tentu masyarakat akan mengikuti orang-orang yang mereka tokohkan. Hal ini kami lakukan mengingat regulasi-regulasi yang telah di terapkan oleh KPUD untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang proses sosialisasinya tidak boleh lewat dari 80 orang, jadi kita lebih membangun komunikasi kepada tokoh masyarakat tadi.” (Wawancara dengan AS 12 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan strategi partai PAN dalam melakukan proses sosialisasi pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan kandidat yang partai PAN usung beserta dengan program-programnya kepada masyarakat melalui pendekatan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang harus menerapkan protokol kesehatan membuat parati PAN memperkecil segmen dalam proses sosialisasi dengan menggandeng orang-orang yang berpengaruh di suatu wilayah.

Pemilu merupakan peristiwa penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan adanya pemilu rakyat dapat memilih secara

langsung kepala daerah bahkan rakyat dapat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mensukseskan pemilu diperlukan sosialisasi politik atau pendidikan politik yang baik kepada masyarakat sehingga akan timbul kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam kegiatan pemilu.

KPUD Bulukumba yang merupakan lembaga pelaksanaan pilkada mengacu kepada regulasi KPU Pusat dimana dalam pelaksanaan proses sosialisasi selama pilkada harus menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Hal tersebut mengacu kepada peraturan KPU no.13 Tahun 2020 terkait pelaksanaan sosialisasi selama perhelatan Pilkada.

"Tahun 2020 saya fikir merupakan pelaksanaan pilkada yang benar-benar baik penyelenggara atau pihak pengawas harus bekerja ekstra karena ada regulasi berkaitan dengan pandemi Covid-19. Aturan tersebut mengacu kepada standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu hal tersebut berdampak kepada proses sosialisasi oleh masing-masing kandidat. Pada dasarnya proses sosialisasi dianjurkan menggunakan metode daring, namun tetap diperkenankan untuk sosialisasi tatap muka dengan membatasi peserta hanya sebanyak 50 orang, harus menggunakan masker, menyediakan hand zantiser dan jaga jarak. Sehingga jadwal-jadwal pelaksanaan sosialisasi harus di stor kepada kami pihak penyelenggara terkait waktu dan tempat pelaksanaan agar mudah kami koordinasikan dengan pihak pengawas untuk melakukan pemantauan." (Wawancara dengan KH 14 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dalam proses pelaksanaan pilkada kabupaten Bulukumba Tahun 2020 harus mengacu kepada surat keputusan yang telah di tetapkan KPU Pusat. Dimana setiap kandidat di berikan arahan terkait proses pelaksanaan sosialisasi. Hal tersebut mengharuskan para peserta

pilkada melaporkan rencana-rencana tempat dan waktu sosialisasi kepada KPUD agar memudahkan pihak pengawas dalam melakukan pemantauan.

Di masa ini, pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam kegiatan politik seperti kampanye calon kepala daerah. Sistem yang berubah antara lain pola kampanye dari yang sebelumnya memilih partai menjadi memilih kandidat. Hal tersebut membuat kandidat berusaha memperoleh sebanyak mungkin suara. Di sinilah teknologi digunakan untuk sosialisasi politik.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses melakukan sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para kandidat pada pelaksanaan pilkada Bulukumba tahun 2020. Melalui media-media online masyarakat banyak mengetahui informasi terkait visi-misi kandidat dan peta kekuatan kandidat. Melalui informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui program-program unggulan terlebih bagi masyarakat yang takut terpapar covid-19.

“Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi saya pikir menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, namun sebagai masyarakat kita hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ada rasa takut sebenarnya bagi saya secara pribadi untuk menghadiri sosialisasi ataupun kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kandidat saya pikir semua orang seperti itu kecuali tim sukses mungkin, namun keterbukaan informasi seperti sekarang ini membuat para kandidat memanfaatkan media sosial dalam memaparkan visi misi mereka, baik dalam bentuk tulisan atau gambar-gambar visual mengenai kandidat. Melalui media online juga saya dapat mengetahui peta kekuatan kandidat, hasil survey dan sebagainya. Pendekatan media seperti ini saya pikir memang sangat bagus dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi bagi kandidat di tengah pandemi Covid 19.” (Wawancara dengan IW 16 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam melakukan sosialisasi terbukti memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program para kandidat yang bertarung pada pilkada Bulukumba tahun 2020. Dengan demikian masyarakat dapat memantau perkembangan pilkada melalui rumah masing-masing sehingga dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui kegiatan sosialisasi tatap muka.

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait proses sosialisasi sebagai strategi partai PAN Bulukumba dalam memasarkan kandidat yang diusung berupaya memperkenalkan kandidat kepada masyarakat melalui pemaparan program unggulan dan visi misi dari kandidat. Tahapan pelaksanaan pilkada yang dilakukan dengan standar protokol kesehatan Covid-19 membuat kegiatan sosialisasi dilakukan secara terbatas, sehingga partai PAN Bulukumba lebih banyak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasinya. Selain itu proses sosialisasi sebagai upaya pemberian informasi kepada masyarakat terkait program unggulan kandidat juga dilakukan melalui pendekatan media cetak, media elektronik atau media sosial yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum.

NO	Bentuk Sosialisasi Yang di Lakukan Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edi Manaf	Waktu
1	Menggandeng tokoh masyarakat sebagai orang yang berpengaruh dalam suatu wilayah	13 maret 2020
2	Menggunakan media-media online untuk memberikan pengetahuan tentang Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edi Manaf	Selama masa kampanye

Kampanye merupakan upaya sistematis guna mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih yang bertujuan agar calon pemilih memberikan suaranya kepada kandidat yang sedang berkompetisi dalam suatu pemilihan. Namun dalam kasus pilkada serentak 2020 dimana Negara sedang berada dalam kondisi menghadapi bencana non alam Covid-19 tentu memiliki mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Suasana berbeda dirasakan oleh masyarakat Bulukumba pada pilkada tahun 2020 dimana tidak ada lagi bentuk kampanye yang menghadirkan masyarakat karena terkendala Covid-19. Hal tersebut memaksa tim pemenangan dan partai membentuk strategi dalam mengkampanyekan kandidat yang diusung.

“Tentu gerak kami dalam pilkada tahun 2020 di batas oleh larangan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak untuk kegiatan kampanye sehingga kami membentuk strategi dengan waktu yang singkat agar dapat mengkampanyekan kandidat kepada masyarakat. Salah satunya melalui kampanye dialogis dengan mengedepankan pembahasan terhadap program-program unggulan jika kandidat terpilih. Memperbanyak titik-titik kampanye. Jadi dalam satu hari itu bisa sampai delapan titik kampanye sehingga benar-benar menguras tenaga tim. Yang terpenting dalam tahapan kampanye kami benar-benar memperhatikan standar protokol kesehatan termasuk membagikan masker kepada masyarakat.” (Wawancara dengan AS 12 April 2021).

Senada dengan pendapat tersebut sekretaris PAN Kabupaten Bulukumba menambahkan pendapat terkait strategi kampanye yang dilakukan.

“Jadwal yang sangat padat dalam melakukan kampanye harus benar-benar dimaksimalkan oleh tim agar memperoleh hasil yang maksimal dalam pilkada. Kami dan tim pemenangan kabupaten sudah membentuk tim-tim pemenangan dari tingkat desa sampai kabupaten. Semua titik yang kami anggap masih membutuhkan sosialisasi kami datangi berdasarkan dari informasi teman-teman yang bekerja di

lapangan. Jadi wilayah yang sudah menjadi basis kami itu tinggal dijaga sementara wilayah yang benar-benar kami anggap rawan disitu kami maksimalkan untuk berkampanye. Tentu hal tersebut berdasarkan mapping yang sebelumnya telah kami lakukan.” (Wawancara dengan MY 12 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye terbatas yang dilakukan oleh partai PAN dalam mensosialisasikan kandidat difokuskan kepada wilayah yang masih minim mendukung pasangan Muchiar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf sehingga wilayah tersebut menjadi fokus kampanye. Penguatan tumpun dilakukan, termasuk menyusun sebaik mungkin jadwal kampanye dialogis dari kandidat.

Kampanye merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan komunikasi politik. Kampanye politik dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan partai dapat tercapai. Kampanye politik ini dilakukan dengan menggunakan instrumen komunikasi politik yang tepat.

Pelaksanaan pilkada Bulukumba di era pandemi Covid-19 membuat KPU menciptakan regulasi yang mengharuskan setiap pasangan kandidat memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye. Setiap kampanye kandidatpun perlu mendapatkan persetujuan dari KPUD Bulukumba sebagai lembaga pelaksana pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat daerah.

“Sosialisasi terkait pilkada tahun 2020 gencar kami lakukan termasuk kepada tim pemenangan terkait batasan-batasan yang perlu ditaati dalam melaksanakan kampanye termasuk senantiasa memperhatikan standar penanganan Covid-19. Bahkan pelaksanaan kampanye perlu mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari KPUD dan Bawaslu, apakah bisa untuk melakukan kampanye atau tidak. Jadi daftar

kunjungan kampanye itu perlu di stor kepada kami pihak pelaksana termasuk laporan kegiatan. Sanksinya sendiri berupa teguran, pembubaran dan jika fatal berdampak kepada diskualifikasi kepada kandidat. Keempat kandidat semuanya mendapat teguran dari pihak bawaslu karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan jukdis yang telah ditetapkan. Pokoknya jika ada kandidat yang tidak mengikuti aturan tentu kami akan melakukan penindakan secara tegas.” (Wawancara dengan KH 14 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pilkada Bulukumba seluruh rangkaian kampanye harus mendapatkan izin dan persetujuan dari KPUD. Dimana bagi pasangan yang tidak mengikuti regulasi sesuai dengan ketetapan pemerintah bersama KPU pusat yang telah disosialisasikan kepada masing-masing kandidat dan tim pemenengannya akan mendapatkan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan utamanya menyangkut langkah penyebaran Covid-19.

Gambar 4.2 mengunjungi kampung nelayan para-para



(Sumber tim pemenangan Andi Utta-Edi)

Pelaksanaan kampanye pada saat terjadi Covid-19 memaksa setiap kandidat harus mengikuti aturan dari KPU dalam rangka melakukan

sosialisasi kepada masyarakat. Namun masih banyak kandidat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan sehingga memerlukan upaya antisipasi dari pengawas dan pelaksana pemilu.

Beberapa masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba banyak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat langsung dimana dalam kegiatan kampanye dialogis tidak semua peserta menerapkan protokol.

“Kegiatan kampanye sama saja sebelum dan pada saat Covid-19, dapat dilihat dengan jelas di berbagai media ada pasangan calon dengan euforia massa melakukan konvoi, kegiatan kampanye dialogis juga banyak tidak menerapkan protokol kesehatan, mereka dengan bebas berjabat tangan tidak menjaga jarak, bahkan ada yang tidak menggunakan masker. Jadi sama saja saya pikir, mungkin ada penilaian atau kriteria tertentu pemberian sanksi itu saya tidak memahami dengan pasti. Intinya itu jika kegiatan kampanye melibatkan banyak orang itu jarang terpublis tapi jika model kampanyenya menerapkan protokol kesehatan bahkan daring pasti ramai pemberitaan.” (Wawancara dengan MT 16 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan berdasarkan dengan analisisnya melihat bahwa pelaksanaan pilkada Bulukumba tahun 2020 masih banyak terjadi pelanggaran utamanya pada penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut membuat apa yang menjadi aturan pemerintah cenderung tidak efektif dalam menangani penyebaran Covid 19 di Bulukumba.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait strategi partai PAN dalam melakukan kampanye di tengah pandemi Covid-19 membentuk struktur tim pemenangan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten dengan memaksimalkan wilayah-wilayah yang bukan merupakan basis dari kandidat yang diusung. Pelaksanaan kampanye juga mendapatkan

pengawasan dari KPUD bersama Bawaslu Bulukumba sehingga kegiatan-kegiatan kampanye harus dilaporkan.

No	Materi Kampanye	Peserta Kampanye
1	Memperbaiki perekonomian masyarakat	Masyarakat Bulukumba
2	Meningkatkan pembangunan di Bulukumba	Masyarakat Bulukumba

Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud dari implementasi demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada dasarnya pilkada merupakan sebuah lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih kepala daerah. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dalam rangkaian pemungutan dan perhitungan suara dimana masyarakat dapat secara langsung menyalurkan aspirasinya dalam memilih kandidat yang diinginkan.

Langkah partai PAN dalam memenangkan kandidat yang diusung yaitu pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf mulai selalu mendapat pengawalan sampai kepada tingkat pemungutan dan perhitungan suara. Puncak perjuangan untuk meraih kemenangan dalam pilkada Bulukumba di tentukan pada fase perhitungan dan pemungutan suara sehingga beberapa strategi dilakukan oleh partai dan kandidat.

“Fase yang paling krusial itu pada saat pemungutan dan perhitungan suara semua kerja tim selama beberapa bulan akan mendapat hasil pada pemungutan dan perhitungan ini. Beberapa strategi kami lakukan dengan melakukan pengawalan terhadap massa pendukung kami, membentuk saksi perTps dengan membekali mereka pengetahuan dan tata cara melakukan pengawalan di TPS. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan hal-hal yang bisa saja merugikan kandidat kami.” (Wawancara dengan MY 12 April 2021).

Pendapat tersebut senada dengan apa yang menjadi hasil wawancara penulis dengan sekretaris partai PAN Bulukumba.

“Penguatan saksi dan TPS merupakan langkah yang kami tempuh dalam mengamankan suara dimasing-masing TPS. Di setiap tps kami mengutus dua orang sebagai saksi dalam yang memperhatikan proses pencoblosan sampai perhitungan suara. Sementara itu kami juga menggunakan saksi bayangan sebanyak sepuluh orang untuk memantau kondisi diluar TPS dan menjemput basis pemilih kami yang tidak memiliki kendaraan. Langkah ini yang kami tempuh, tentu untuk meraih kemenangan membutuhkan kerja tim yang terstruktur dan massif.” (Wawancara dengan AS 12 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara bentuk pengawalan yang dilakukan partai PAN bersama kandidat dan tim pemenangan adalah mengkoordinir pembentukan saksi dengan memberikan sosialisasi terkait tugas mereka dalam proses pencoblosan sampai perhitungan dilakukan.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan 5 tahun sekali sangat erat kaitannya dengan istilah TPS. Istilah itu sendiri merupakan tempat masyarakat menyalurkan aspirasi guna memilih kandidat yang maju dalam pemilihan. Dalam Pilkada 2020 suasana TPS tersebut berbeda dari sebelumnya dimana setiap TPS harus mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pilkada Bulukumba tahun 2020 dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat seperti biasanya. Namun pada pilkada Bulukumba tahun 2020 setiap TPS dilengkapi dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh PKPU dalam melayani masyarakat untuk menyalurkan

aspirasi melalui pemilihan ditengah wabah Covid-19.

“Pada dasarnya proses pemungutan dan perhitungan suara dilakukan seperti pada umumnya. Hanya saja yang berbeda dalam pilkada 2020 kemarin itu setiap TPS dilengkapi dengan alat pendeteksi suhu tubuh, tempat cuci tangan, hand zanitiser dan kaus tangan. Bagi para pemilih juga diwajibkan untuk menggunakan masker, masyarakat yang tidak menggunakan masker tidak diizinkan untuk memasuki TPS. Dalam mencegah kerumunan para pemilih di bagi menjadi 3 shift berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dan bagi masyarakat yang telah menyalurkan aspirasi mereka di persilahkan untuk kembali kerumah masing-masing. Langkah ini merupakan wujud KPUD Bulukumba dalam mendukung pencegahan penyebaran Corona di kabupaten Bulukumba.” (Wawancara dengan RM (14 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan dalam pelaksanaan proses pemungutan dan perhitungan suara setiap TPS telah di tetapkan juknis sebagai petunjuk agar mendesain TPS masing-masing wilayah sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Tentu dengan demikian pelaksanaan pemilihan tidak menjadi spisentrum baru penyebaran Covid-19.

Secara hukum, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat yakni Perppu No 02 Tahun 2020. Artinya, pelaksanaan pilkada bukan semata kemauan KPU sebagai penyelenggara tetapi amanat undang-undang dalam hal ini Perppu. Menggelar pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga dapat menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Publik tidak perlu ragu, penyelenggara pemilu di Indonesia sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu yang seringkali sistem dan aturan mainnya berubah.

Penyelenggaraan Pilkada Bulukumba tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan hal tersebut merupakan bentuk keinginan masyarakat dalam

memilih pemimpin baru untuk Kabupaten Bulukumba termasuk pemimpin yang memahami pola penanganan Covid-19.

“Kalau masyarakat takut untuk memilih karena alasan Covid tentu tidak menurut saya. Dimana memang setiap TPS telah disediakan berbagai perlengkapan, sudah disemprot disinfektan, bahkan para KPPS telah dilengkapi alat apd. Tentu ini memberikan kesan nyaman kepada masyarakat dan tidak perlu takut dengan kondisi yang dihadapi. Pemilihan bupati merupakan momentum memilih pemimpin baru Bulukumba sebagai kepala pemerintahan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu setiap kandidat saya fikir mempunyai visi mis yang bagus termasuk program-program penanganan Covid-19.” (Wawancara dengan KW 16 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwasannya masyarakat tidak memiliki kekhawatiran akan terpapar Covid-19 dikarenakan tempat pemungutan suara telah sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Euforia masyarakat Bulukumba dalam memilih bupati sebagai bentuk keinginan adanya perbaikan yang dilakukan dalam memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan strategi yang dilakukan partai PAN dengan partai pengusung lain bersama kandidat dan tim pemenangan adalah memperkuat pengawalan basis massa dan pembentukan saksi-saksi setiap TPS yang telah dibekali pengetahuan dari pelatihan yang dilakukan. Langkah tersebut untuk memaksimalkan proses akhir sebagai penentuan keberhasilan kandidat dalam meraih kemenangan untuk menjadi bupati dan wakil Bupati Bulukumba.

No	Jumlah Pemilih 2018/2019	Jumlah Pemilih 2020/2021
1	304.217 pemilih tetap	239.008 pemilih tetap

Berdasarkan data yang diuraikan diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah pemilih tetap tahun 2018/2019 dengan 2020/2021 mengalami penurunan sebanyak 65,204 yang menandakan bahwa Pandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah pemilih tetap di Kabupaten Bulukumba.

Political marketing adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh kandidat atau kontestan politik dalam membangun kepercayaan dan *image* publik. *Political marketing* harus dilihat secara komprehensif diantaranya: *Political marketing* lebih dari sekedar komunikasi politik; *Political marketing* diaplikasikan dalam seluruh proses organisasi politik, tidak hanya sebatas kampanye politik akan tetapi sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, *image*, *platform*, dan program yang ditawarkan; *political marketing* menggunakan konsep *marketing* secara luas, tidak hanya terbatas pada teknik *marketing*, namun juga sampai strategi *marketing*, dari teknik publikasi menawarkan ide, program dan desain produk sampai ke market *intellegent* serta pemrosesan informasi; *political marketing* banyak disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. Misalnya produk politik merupakan fungsi dari pemahaman sosiologis mengenai simbol dan identitas. Sedangkan faktor psikologisnya, kedekatan emosional dan karakter seorang pemimpin sampai ke aspek rasionalitas

platform partai dan konsep *political marketing* bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari pemilihan umum sampai ke proses pelobian di parlemen. (Firmanzah, 2012).

b. Komunikasi Politik

Pilkada merupakan panggung politik lokal yang menempatkan partai politik sebagai pemeran utama berjalannya demokratisasi di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Berdasarkan aturan PKPU No. 1/2020 syarat ambang batas bagi kandidat agar dapat mencalonkan sebagai peserta adalah minimal mengantongi jumlah kursi sebanyak 20 % dari total suara partai yang ada di DPRD. Pasangan Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf yang diusung oleh partai PAN dalam pilkada Bulukumba mengantongi suara partai sebanyak 13 kursi. Hal tersebut menjadikan usungan PAN dapat maju sebagai kandidat dalam kontestasi pilkada tersebut.

“Syarat yang harus kami penuhi untuk dapat mengusung kandidat untuk maju dalam pilkada Bulukumba adalah mengumpulkan suara partai sebanyak 8 kursi. Sementara dari beberapa partai yang ikut berkoalisi dengan kami itu berhasil mengumpulkan sebanyak 13 kursi sehingga kami dapat memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh PKPU sebagai syarat administrative dalam mencalonkan bapak Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf sebagai kandidat dalam pilkada Bulukumba tahun 2020.” (Wawancara dengan AS 12 April 2021).

Hasil wawancara tersebut dipertegas oleh sekretaris partai PAN Bulukumba terkait jumlah partai pengusung pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf dalam pilkada Bulukumba.

“Tentu untuk mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati kita harus memenuhi syarat ambang batas yang telah ditetapkan oleh KPU. Dari total kursi di DPR Bulukumba sebanyak 40 kursi berarti syarat untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati itu minimal kami harus mengumpulkan 8 kursi. Partai PAN sendiri itu ada total 4 kursi, Gerindra 5 kursi, PKS 3 kursi dan Berkarya 1 kursi jadi total ada 13 kursi. Tentu dalam mengusung kandidat kami sudah mempunyai kontrak politik dengan partai-partai pengusung utamanya dalam menciptakan program-program untuk menjawab permasalahan masyarakat di Kabupaten Bulukumba ini.” (Wawancara dengan MY 12 April 2021).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pasangan Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf yang diusung oleh partai PAN memperoleh 13 kursi dari 8 kursi sebagai syarat dari pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bulukumba. Partai PAN berkoalisi dengan 3 partai pengusung lain yaitu Gerindra, PKS dan Berkarya.

Gambar 4.1 Penyerahan Surat Rekomendasi usungan Partai Gerindra



(Sumber Tim Pemenangan Andi utta-Edy)

Posisi partai politik dalam pilkada sangat strategis. Hal ini sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2020, semua calon yang berhak maju dalam

pertarungan harus dicalonkan partai politik tertentu. Bahkan, calon kepala daerah yang berhak maju harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 20 % kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau suara pada pemilihan legislatif.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 di ikuti oleh empat pasangan calon. Hal tersebut berdasarkan informasi dari KPUD Kabupaten Bulukumba dimana semua kandidat berhasil memenuhi syarat ambang batas dukungan partai politik yang ada di DPR.

“Jadi kontestasi pilkada Bulukumba Tahun 2020 walau dalam kondisi pandemi Covid 19 namun melibatkan empat peserta pilkada. Tentu hal tersebut cukup menaikkan gairah politik khususnya di daerah ini. Keempat pasangan calon tersebut yaitu nomor urut 1 ada Andi Hamzah Pangki-Andi Murniyati Makking diusung oleh tiga partai yakni Golkar (4), Hanura (2) dan Demokrat (2). Pasangan Nomor urut 2 Askar HI-Arum Spink diusung oleh partai PPP (6) dan Nasdem (5). Lalu, nomor urut 3 terdapat pasangan Tomy Satria Yulianto-Andi Makkasau diusung oleh partai PDIP (3), PKB (4) DAN PBB (1). Sementara pasangan nomor urut 4 ada Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf diusung oleh partai Gerindra (5), PAN (4), PKS (3), Dan Berkarya (1). Jadi semua partai yang mempunyai kursi di DPRD Bulukumba terlibat dalam mengusung kandidat pada pilkada Bulukumba tahun 2020. (Wawancara dengan RM 14 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan pilkada Bulukumba diikuti oleh empat pasangan calon yang merupakan usungan dari semua partai yang memiliki kursi di dewan legislative Kabupaten Bulukumba. Keempat kandidat yang bertarung menjadi tanda bahwa momentum pilkada tersebut merupakan bentuk panasnya persaingan politik untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.

Demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dukungan partai politik terhadap kandidat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan pasangan yang bertarung dalam kontestasi tersebut.

"Salah satu alasan saya memilih pasangan Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf itu karena didukung oleh partai-partai yang saya pikir masih benar-benar bersih dari isu-isu korupsi. Hal lain karena pada pilpres saya mendukung Prabowo tentu saya akan memberikan dukungan kepada pasangan yang didukung oleh Gerindra, walau saya bukan kader partai, hanya saja mungkin bisa di bilang bentuk fanatisme." (Wawancara dengan AZ 16 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan ketokohan dari elit partai politik ternyata menjadi pandangan tersendiri bagi sebagian masyarakat dalam menentukan arah dukungan pada pilkada Bulukumba tahun 2020. Walau dalam beberapa pandangan alasan tersebut sangat tidak rasional namun dapat menjadi sebuah variabel bagi masyarakat dalam memberikan partisipasi politik seperti dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait dukungan partai politik partai PAN bersama Gerindra, PKS dan Berkarya yang mengusung pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf memiliki jumlah suara dalam DPR sebanyak 13 kursi sehingga dapat memenuhi syarat ambang

batas yang telah ditetapkan KPU pusat dimana partai pengusung minimal mempunyai 20% jumlah kursi di DPR untuk mengusung kandidat. Kabupaten Bulukumba sendiri memiliki 40 kursi di DPR sehingga syarat yang ditentukan bagi kandidat minimal mengantongi 8 kursi agar dapat bertarung dalam pilkada Bulukumba tahun 2020.

No	Nama Kandidat	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1	H. Andi Hamzah Pngki-Hj-A Murniyati, M.Si	GALKOR, HANURA, DEMOKRAT	8
2	Askar HL, SE-Arum Spink, S.H.I	NASDEM dan PPI	11
3	Tomy Saira Y, S.IP- H. A. Makkassau, MM	PKB, PDIP, PBB	5
4	Muchtar Ali Yusuf-H. A. Edy Manaf, S.Sos	PAN, GERINDRA, PKS dan BERKARYA	13

Penyelenggaraan Pilkada pasca disahkannya UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dikategorikan masuk kedalam rezim pemilu atau sering diistilahkan dengan sebutan PemiluKada. Pergeseran Pilkada menjadi masuk dalam rezim hukum Pemilu ini tidak terlepas dari Pengaruh Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses pemilihan kepala daerah Bulukumba telah selesai dan berhasil memenangkan kandidat usungan partai PAN yaitu pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf dengan perolehan 92.978 suara dengan mengalahkan tiga kandidat lain. Namun kandidat lain merasa keberatan

dengan kemenangan tersebut dan melakukan gugatan ke mahkamah kontitusi atas dugaan kecurangan pada pilkada Bulukumba tahun 2020.

“KPUD Bulukumba telah menetapkan pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf usungan partai PAN sebagai pemenang. Namun ada dugaan kami melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan magsif. Dalam dunia politik memang seperti itu adapun langkah-langkah yang kami persiapkan dalam menghadapi gugatan tersebut adalah mempersiapkan saksi-saksi dan mempersiapkan jejak rekam digital untuk membantah tuduhan yang diarahkan kepada kami. Karena kami meyakini kemenangan pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf merupakan bentuk dukungan dari masyarakat Kabupaten Bulukumba.” (Wawancara dengan MY 12 April 2021).

Sekretaris partai PAN Bulukumba menambahkan terkait strategi untuk membantah tuduhan dalam sengketa pilkada Bulukumba yang diarahkan kepada kandidat yang diusung oleh partai PAN.

“Ada gugatan yang dilakukan oleh paslon nomor dua terhadap hasil keputusan KPUD Kabupaten Bulukumba yang menetapkan pasangan nomor empat sebagai pemenang berdasarkan hasil perhitungan suara. Mereka menyebutkan ada indikasi kecurangan, katanya ada dugaan pelanggaran administrasi politik uang dari pasangan nomor urut empat termasuk gugatan terhadap KPU dan Bawaslu Bulukumba. Ini hal yang biasa terjadi dalam pemilihan namun entah mengapa pada saat sengketa ingin disidangkan pada tanggal 16 february 2021 perselisihan terkait hasil pemilihan dinyatakan selesai karena pasangan nomor urut dua telah mencabut laporan mereka. Saya fikir itu bentuk kedewasaan agar tidak memperpanjang persoalan dan lebih mengedepankan kepentingan bersama.” (Wawancara dengan AS 12 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan proses sengketa pilkada yang diajukan kemahkamah kontitusi merupakan adanya indikasi pelanggaran pilkada yang bersifat TSM dan menggunakan politik uang. Namun dalam perjalanannya hal tersebut tidak dilanjutkan karena gugatan yang diajukan telah dicabut pihak pemohon.

Salah satu kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai intensitas tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Mulai masa pemilihan umum tahun 2004, MK telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang untuk memilih pejabat negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal konstitusi.

Dalam proses sengketa pilkada Bulukumba tahun 2020 KPUD dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba juga ikut dilaporkan oleh pemohon dari pasangan nomor urut dua. Hal tersebut membuat KPUD Bulukumba mempersiapkan berkas laporan sebagai bukti pelaksanaan dan menggandeng kuasa hukum untuk mendampingi KPUD dalam sengketa tersebut.

“Paslon Nomor urut dua memasukkan gugatan ke MK dengan nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Bulukumba. Pelanggaran TSM didalilkan Pemohon terjadi di 10 kecamatan se-Kabupaten Bulukumba. Kemudian Pemohon juga menduga adanya masalah jumlah selisih penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di delapan kecamatan yang mencapai 33.667 suara. Namun belakangan mereka mencabut laporan tersebut.” (Wawancara dengan KH 14 April 2021).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu komisioner KPUD Bulukumba terkait gugatan hasil pilkada Bulukumba tahun 2020.

“Sebelumnya persoalan yang diajukan ke MK itu sempat diajukan kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI namun gugatan mereka ditolak dan langkah terakhir yang paslon nomor urut dua lakukan

melaporkan kepada MK. Tentu untuk menepis tuduhan tersebut beberapa langkah-langkah telah kami lakukan dengan menyiapkan dokumen-dokumen terkait gugatan yang dilaporkan termasuk saksi dan kuasa hukum telah kami siapkan untuk menghadapi gugatan pemohon." (Wawancara dengan RM 14 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan KPUD yang ikut terlapor dalam sengketa pilkada Bulukumba telah mengantisipasi laporan oleh pasangan nomor urut dua yang merupakan pemohon dalam sengketa pilkada Bulukumba Tahun 2020. Namun baru proses persidangan diawal laporan tersebut ditarik oleh pihak kuasa hukum pemohon.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait strategi yang dilakukan oleh PAN dalam menghadapi sengketa pilkada dengan pelaporan oleh pemohon yaitu pasangan nomor urut dua dengan mempersiapkan bukti-bukti, saksi dan kuasa hukum yang akan mendampingi termohon pasangan nomor urut 4 yang dilaporkan dalam proses sengketa pilkada Bulukumba atas laporan dugaan politik uang dan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan. Namun laporan tersebut telah di cabut oleh pemohon dalam sidang perdana yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi.

Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik. Menurut Maswadi Rauf seorang pakar politik dalam Soemarno (2015), berpendapat bahwa komunikasi politik adalah komunikasi

bercirikan politik, karena terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

Pemilihan kepala daerah merupakan ajang pemilihan kepala pemerintahan di daerah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dari suatu daerah. Kontestasi pilkada Bulukumba tahun 2020 yang diikuti empat pasangan calon memicu persaingan sengit dalam perhelatan kontestasi pilkada. Pada akhirnya pasangan nomor urut empat yaitu Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf yang diusung oleh partai PAN bersama Gerindra, PKS dan Berkarya keluar sebagai pemenang.

Kemenangan tersebut diraih tentu tidaklah mudah, beberapa strategi yang dilakukan partai, kandidat dan tim pemenanganpun telah dilakukan. Dalam perjalannya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi strategi pemenangan partai PAN dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba di Tahun 2020 yang akan dibahas dalam poin-poin sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Struktur Tim Pemenangan yang solid

Kemenangan pasangan nomor urut empat Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf yang merupakan usungan dari partai amanat nasional dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2020 tidak terlepas dari kinerja tim pemenangan yang bekerja instens dalam meraih hasil maksimal.

“Saya selalu mengatakan kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pencapaian ini sendiri tidak terlepas dari kerja-kerja tim pemenangan yang telah di bentuk mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan sampai ketinggian desa. Dalam waktu bekerja kurang lebih hanya tiga bulan terlebih dalam kondisi Covid-19 yang melanda. Setiap tim bekerja tidak kenal lelah siang dan malam melalui arahan-arahan terkait proses pelaksanaan pemilihan, kunci utamanya semua tim sangat solid dalam bekerja ini merupakan perwujudan dalam membangun Bulukumba yang semakin baik.” (Wawancara dengan MY 12 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan kinerja tim pemenangan nomor urut empat dalam meraih hasil yang maksimal tidak terlepas dari kesolitan tim dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kerja-kerja tim pemenangan merupakan penentu bagi kandidat untuk meraih suara tertinggi pada pemilihan kepala daerah.

Kinerja tim pemenangan pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf diakui oleh masyarakat dalam melakukan sosialisasi secara mendetail terkait program-program yang ditawarkan dalam pembangunan Bulukumba satu priode yang akan datang. Hal tersebut kemudian menjadi alasan dari beberapa masyarakat menjatuhkan pilihan terhadap pasangan nomor urut empat tersebut.

“Pemaparan dari tim pemenangan nomor urut empat memang dilakukan secara mendetail dan mudah dipahami. Mulai dari program unggulan, berapa anggaran yang dibutuhkan dan bagaimana bentuk pelaksanaannya semua dipaparkan secara rasional. Sehingga tidak heran memang banyak masyarakat yang memilih pak Muchtar dan pak edy manaf” (Wawancara dengan AZ 16 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan bentuk kampanye dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat oleh tim pemenangan pasangan nomor urut empat menjadi salah satu indikator masyarakat menentukan pilihan terhadap pasangan tersebut.

2. Ketokohan H Andi Muchtar Ali Yusuf

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba melibatkan salah satu tokoh sebagai peserta pilkada yaitu bapak H. Andi Muchtar Ali Yusuf yang berpasangan dengan Edy Manaf yang merupakan usungan partai PAN. Selain dikenal sebagai pebisnis nasional ketokohan orang yang akrab disapa Andi Utta ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan di Kabupaten Bulukumba.

“Kalau saya melihat salah satu keberhasilan Andi Utta memenangi pilkada 2020 di Bulukumba tidak terlepas dari jati diri beliau sebagai putra asli Bulukumba. Banyak isu yang mengatakan beliau adalah orang Sinjai, Jeneponto tapi itu di tepis oleh Andi Utta. Bagaimana bisa beliau dikatakan bukan orang Bulukumba sedangkan Kakeknya bernama Karaeng Hajji Makkarodda adalah salah satu raja di sini. Latar belakang tersebut yang kemudian membuat pak Andi Utta ini sangat dikenal dan darah Bulukumbanya tidak perlu di tanyakan lagi, beliau siap mengabdikan untuk membangun kampung kelahirannya.” (Wawancara dengan AS 12 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan jati diri seorang H. Andi Muchtar Ali Yusuf yang merupakan cucu dari raja di Bulukumba menjadikan sosoknya di tokohkan ditengah masyarakat. Hal tersebut

merupakan salah satu alasan terpilihnya pasangan nomor empat ini sebagai kepala daerah di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait faktor pendukung strategi pemenangan partai PAN dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba di Tahun 2020 adalah struktur tim pemenangan yang solid, dimana tim pemenangan tersebut terbentuk mulai tingkat desa sampai ketinggian Kabupaten dan telah di bekali edukasi terkait mekanisme dalam memenangkan kandidat. Selanjutnya ketokohan dari kandidat itu sendiri yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Bulukumba dan statusnya sebagai cucu dari salah satu raja yang pernah menjabat di Bulukumba menjadikan identitas seorang Andi Utta sebagai putra daerah asli.

b. Faktor Penghambat

1. Apatisme Masyarakat

Sikap apatis masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada Bulukumba tahun 2020. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa janji politik hanya pada saat kampanye saja. Selanjutnya jika terpilih hal tersebut akan terlupakan. Sehingga dalam melakukan sosialisasi tim pemenangan sangat sulit memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang banyak kandidat memiliki janji kampanye yang sangat bagus pada saat kampanye tapi ketika terpilih ternyata tidak sesuai apa yang dikerjakan dan apa yang dilaksanakan. Saya mengatakan bahwa Pak Utta dan pak Edi Manaf ini tidak mungkin mau mengecewakan kita semua, apa lagi ingin melakukan korupsi. Beliau itu latar belakang pebisnis uangnya banyak dan tidak mungkin mencederai namanya dengan korupsi. Persoalan tersebut membuat banyak masyarakat bersikap apatis, bahkan ketika kami datang ada saja beberapa masyarakat yang berteriak bahwa semua janjinya itu bohong. Maka dari itu kami mengintruksikan agar

semua tim benar-benar mengkampanyekan kandidat dengan memaparkan secara lugas terkait program mulai dari berapa anggaran yang dibutuhkan, sasaran program dan apa hasil dari program itu nantinya. Agar masyarakat benar-benar bisa memahami bahwa kehadiran kami tulus untuk membangun Kabupaten Bulukumba.” (Wawancara dengan MY 12 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang memandang politik hanya sebagai ajang pencitraan saja untuk memperoleh kekuasaan. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat bersikap apatis sehingga tidak ingin melibatkan diri dalam pemilihan.

Perhelatan pilkada tahun 2020 di akui oleh KPUD Bulukumba terjadi penurunan partisipasi pemilih di banding pilkada tahun 2015. Hal tersebut dilatar belakangi kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat itu sendiri serta sikap trauma dalam partisipasi pilkada sehingga penguatan edukasi politik sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

“Pada pilkada Bulukumba tahun 2020 kami memang menargetkan partisipasi pemilih pada angka 77,5 persen. Harus diakui bahwa pemilih pada pilkada 2020 terjadi penurunan sebanyak 48.704 di banding pilkada tahun 2015. Dimana tahun 2015 DPT kita itu sebanyak 365.990 pemilih sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 317.286 pemilih. Namun terjadi peningkatan partisipasi sebanyak 2 persen di banding pemilu tahun 2019. Pada pemilu 2019 partisipasi pemilih sebanyak 72,78 persen sedangkan pilkada 2020 berada diangka 74,25 persen.” (Wawancara dengan RM 14 April 2021).

Senada dengan pendapat informan diatas salah satu komisioner KPUD Kabupaten Bulukumba menambahkan partisipasi pemilih pilkada Bulukumba tahun 2020.

“DPT Bulukumba yang terdaftar itu pada pilkada tahun 2020 sebanyak 317.286 pemilih sementara yang menyalurkan hak pilihnya hanya 239.008 pemilih. Jadi masih ada sekitar 78.278 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari target 77,5 persen yang kami targetkan hanya 74,5 persen yang berhasil dipenuhi. Tentu kedepan sosialisasi, pendidikan politik dan semua pihak yang terkait perlu lebih giat dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat.” (Wawancara dengan KPU14 April 2021).

Hasil wawancara dari dua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa

angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bulukumba belum memenuhi target yang ditetapkan oleh KPU Bulukumba. Masih ada puluhan ribu pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pilkada Bulukumba tahun 2020.

2. Letak Geografis

Pilkada merupakan persaingan kandidat dalam memperoleh dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya agar dapat menjadi pemenang dalam kontestasi tersebut, tidak jarang para kandidat dan partai melakukan sosialisasi dan kampanye ke daerah pegunungan dan dataran rendah guna mendapatkan suara. Seperti Kabupaten Bulukumba yang memiliki luas wilayah 1.154,67 km² menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor politik dalam melakukan kampanye.

“Saya melihat kondisi wilayah Bulukumba ini sangat luas sehingga jadwal yang singkat harus di selesaikan dengan mengelilingi Bulukumba untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih. Belum lagi masih banyak daerah yang terisolir seperti Kajang misalnya dan beberapa wilayah yang berada di dataran tinggi. Ini tentu menyulitkan kami dan tim pemenangan agar dapat mengakses wilayah tersebut belum lagi jika kami mendapat penolakan di suatu wilayah. Namun karena target kami ingin mencapai hasil yang maksimal semua itu harus dilalui.” (Wawancara dengan KH 14 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kondisi geografis Bulukumba yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan menjadi tantangan tersendiri bagi kandidat dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Hal tersebut membuat para tim pemenangan bekerja secara maksimal dalam meraih pencapaian yang ditargetkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait faktor penghambat dalam strategi pemenangan partai amanat nasional (PAN) dalam memenangkan kandidat pada pilkada Bulukumba tahun 2020 terdapat dua hambatan. Pertama, partai dan kandidat dihadapkan kepada persoalan apatisme pemilih yang menganggap bahwa pilkada hanya merupakan janji kampanye bagi para aktor politik untuk meraih kekuasaan. Kedua letak geografis Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah menjadikan proses kampanye berjalan cukup cepat sesuai dengan jadwal yang begitu singkat.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang di temukan peneliti di lapangan bahwa strategi yang dilakukan Partai Amanat Nasional dalam memenangkan kandidat yang mereka usung dalam pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemik kovid-19 yaitu Partai Amanat nasional ketika melakukan sosialisasi kandidat yang mereka usung, mereka menggandeng tokoh masyarakat sebagai orang yang berpengaruh di suatu wilayah, kemudian partai amanat nasional juga menggunakan media online untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang paslon yang mereka

usung dalam hal ini Muchtar Ali Yusuf dan Andi Manaf. Selain itu partai amanat nasional juga menggandeng partai politik besar untuk mengumpulkan suara partai sebanyak 8 kursi sehingga paslon yang di usung oleh partai amanat nasional dapat memenuhi aturan yang di tetapkan KPU sebagai syarat administratif. Kemudian partai amanat nasional juga melakukan kampanye dialogis dengan mengedepankan pembahasan terhadap program-program unggulan jika kandidat yang di usung terpilih nantinya, selain itu partai amanat nasional juga membentuk struktur tim pemenangan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten dengan memaksimalkan wilayah-wilayah yang bukan merupakan basis dari kandidat yang di usung. Kemudian partai amanat nasional juga memperkuat pengawalan basis massa dan membentuk saksi-saksi di setiap TPS yang telah dibekali pengetahuan dari pelatihan yang telah mereka lakukan, langkah tersebut mereka lakukan guna memaksimalkan proses akhir sebagai penentuan keberhasilan kandidat dalam meraih kemenangan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

Adapun faktor yang melatar belakangi strategi pemenangan partai amanat nasional (PAN) di tengah pandemik covid-19 dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yaitu pertama ada faktor pendukung, adapun faktor pendukung strategi pemenangan partai amanat nasional dalam PILKADA di Kabupaten Bulukumba di tahun 2020 adalah struktur tim yang solid, dimana tim pemenangan tersebut terbentuk mulai tingkat desa sampai ketinggian kabupaten dan telah

dibekali edukasi terkait mekanisme dalam pemenangan kandidat, selain itu ketokohan dari kandidat itu sendiri yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Bulukumba dan statusnya sebagai cucu dari salah satu raja yang pernah menjabat di Bulukumba menjadi identitas Andi Utta sebagai putra asli Bulukumba. Kemudian adapun faktor penghambatnya yaitu pertama partai dan kandidat dihadapkan kepada persoalan apatisme pemilih yang menganggap bahwa pilkada hanya merupakan jaji kampanye bagi para aktor politik untuk meraih kekuasaan. Kedua letak geografis Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah menjadikan proses kampanye berjalan cukup cepat sesuai dengan jadwal yang begitu singkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 yang telah dilakukan penulis selama dua bulan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Marketing politik dalam sosialisasi kandidat yaitu kandidat bersama partai PAN dan tim pemenangan yang telah di bentuk memeparkan visi misi dan program unggulan kepada masyarakat melalui pertemuan terbatas dengan memaksimalkan peran dari tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dukungan partai politik yaitu partai PAN bersama Gerindra, PKS dan Berkarya yang mempunyai total kursi sebanyak 13 orang di legislative telah memenuhi syarat pencalonan pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf untuk bertarung dalam pilkada Bulukumba Tahun 2020. Kampanye yaitu melalui pembentukan struktur tim pemenangan dari tingkat kabupaten sampai desa dalam memaksimalkan kegiatan kampanye terbatas yang dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19 yang menargetkan wilayah yang masih kurang partisipan terhadap pasangan Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf. Pemungutan dan perhitungan suara yaitu partai PAN dengan partai pengusung lain bersama kandidat dan tim pemenangan adalah memperkuat

pengawasan basis massa dan pembentukan saksi-saksi setiap TPS yang telah dibekali pengetahuan dari pelatihan yang dilakukan. Sengketa pilkada yaitu partai PAN bersama Gerindra PKS dan Berkarya dalam menghadapi sengketa pilkada dengan pelaporan oleh pemohon yaitu pasangan nomor urut dua dengan mempersiapkan bukti-bukti, saksi dan kuasa hukum yang akan mendampingi termohon pasangan nomor urut 4 yang dilaporkan dalam proses sengketa pilkada Bulukumba atas laporan dugaan politik uang dan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan.

2. Faktor pendukung yaitu struktur tim pemenangan yang solid, dimana tim pemenangan tersebut terbentuk mulai tingkat desa sampai ketinggian Kabupaten dan telah dibekali edukasi terkait mekanisme dalam memenangkan kandidat. Selanjutnya ketokohan dari kandidat itu sendiri yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Bulukumba dan statusnya sebagai cucu dari salah satu raja yang pernah menjabat di Bulukumba. Dan Faktor penghambat yaitu Pertama, partai dan kandidat dihadapkan kepada persoalan apatisme pemilih yang menganggap bahwa pilkada hanya merupakan janji kampanye bagi para aktor politik untuk meraih kekuasaan. Kedua letak geografis Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah menjadikan proses kampanye berjalan cukup cepat sesuai dengan jadwal yang begitu singkat.

B. Saran

1. Bagi para kandidat ketika masa kampanye hindari kegiatan kampanye secara arak-arakan karena hal tersebut sangat tidak efisien dan mengganggu ketertiban umum terutama di masa pandemic Covid-19 setiap kandidat harus memperhatikan protocol kesehatan.
2. Bagi KPUD Dan Bawaslu hendaknya perencanaan kampanye disusun dengan analisa internal dan eksternal sehingga di peroleh perencanaan yang komperehensif dan dapat diaplikasikan oleh semua pihak terlebih di masa Covid-19.
3. Bagi masyarakat yang merupakan pemilih hendaknya benar-benar memerhatikan visi misi kandidat yang benar-benar pro terhadap pembangunan dan pengembangan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah, & Abdul, R. (2014). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Prenamedia Group.
- Amalia, N., & Samopa, F. (2012). Perencanaan Strategis Si/Ti (Studi Kasus Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik). *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi*.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal MODERAT*.
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gunawan, O. (2015). Analisa Strategi Bersaing Duda Bakery Donalson Di Makassar. *Agora*.
- Hanafi, H.-S. (2011). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*.
- Hidayat, C. (2014). Partai Politik. *Wikipedia*.
- Kadir, A. G. (2014). DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Lindawati, D. S. (2014). Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014. *Politica*.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Napitupulu, E. W. B. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Hulman Sitorus, SE dan Drs. Koni Ismail Siregar pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Pematangsiantar 2010). *Flow*.
- Natalia, A. (2015). Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada serentak di Indonesia tahun 2015. *Jurnal Tapis*.
- Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Mazahib*.
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*.

- Rachmatie, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sulaeman, A. (2017). DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *CosmoGov*.
- Surbakti, R., SUPRIONO, D., ASY'ARI, H., & Mellaz, A. (2011). Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat Menyederhanakan Jumlah Partai Politik. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Tjahjo Kumolo. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak. In *Politik Hukum Pilkada Serentak*.
- Wedhasmara, a. (2014). Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi dengan Menggunakan Metode Ward and Peppard. *Jurnal Sistem Informasi*.

DOKUMENTASI PENELITIAN





EBUT
NANGAN

HADIA DALAH MEMBERI SEBUAH
PERUBAHAN BAGIAN DARI HERDA TEAM,
SALAH SATU YANG TERPENTING ADALAH
BAGAIMANA CARA MENGELOLA STRATEGI
ITU DENGAN SEBAH MUNCHIN.
TERIMAH KASIH ATAS WEJANGAN DAN
MASUKAN BELIAU SEMOGA TETAP AMANAH
DALAM MENJALANKAN TUGAS AMIN.

#TIDAKSEDANGBERKAMPANYE

DPW PAN SULA
SELAMAT MUS
KABUPATEN I

MEDIA CENTER

PILKADA PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN BUKUMBA



MEDIA CENTER

PILKADA PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN BUKUMBA







PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 14 April 2021

Nomor : 0170/DPMPTSP/IV/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bulukumba
2. Ketua Partai Amanat Nasional
Masing – Masing
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/210/Kesbangpol/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini

Nama : AHMAD MUQTASIR MUQSIT
Nomor Pokok : 105641116916
Program Studi : FAK. SOSIAL DAN POLITIK
Institusi : UNISMUH MAKASSAR
Alamat : JL. SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di Komisi Pemilihan Umum dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KAB. BULUKUMBA TAHUN 2020" yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari s.d 15 April 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.
2. Tidak mengganggu keamanan/ ketertiban masyarakat setempat.
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Co Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba.
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas

Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA
Pangkat : Pembina Utama Muda
: 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan).
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba.
3. Arsip.



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Afauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ahmad Muqtasir Muqsit
Prodi : Ilmu Pemerintahan

dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	12%	15 %
2	Bab 2	23%	25 %
3	Bab 3	15%	15 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

inyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Juni 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartaman, S.IP.,M.IP
NBM. 137 4895

**Mengetahui,
Ketua Prodi**

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si
NBM. 103 1102